**Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Arus Uang:**

**Identifikasi Skenario dan Resiko Mega Proyek Infrastuktur Indonesia terhadap Masyarakat, Hutan, dan Lingkungan Hidup**

**Rio Ismail**

**The Ecological Justice**

**20 augustus 2015**

**Latar Belakang**

Dalam RPJMN Indonesia 2015-2016 yang tercantum dalam program NAWACITA Jokowi-JK, target pertama dari 5 sasaran pembangunan prioritas adalah pembangunan infrastuktur Indonesia. Prioritas ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan konektivitas dan percepatan distribusi sumberdaya antar pulau dan daerah; peningkatan swasembada pangan; dan peningkatan kapasitas produksi energi. Pembangunan infrastuktur ini kemudian diturunkan ke dalam bentuk proyek proyek besar pembangunan pelabuhan, rel kereta, dan tol lintas provinsi, tol laut, waduk, pembangkit listrik, dan pembangunan proyek skala besar lainnya di pesisir dan laut.

Proyek-proyek besar Program Nawacita ini sesungguhnya hanya pergantian kulit dari Proyek MP3EI (Master Plan Percerpatan Pembangunan Ekonomi Indonesia) pada era pemerintahan Presiden SBY. Target utama pembangunan merupakan proses memfasilitasi peningakatan eksploitasi dan distribusi SDA Indonesia.

Pembangunan infrastruktur tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga pembiayaan terutama *World Bank Group* (WBG) termasuk di dalamnya *International Finance Corporation* (IFC), *Asia Development Bank* (ADB), *Islamic Development Bank* (IDB), sejumlah negara donor seperti Jerman, Jepang, dan lembaga multilateral lainnya maupun lembaga pembiayaan baru yaitu *Asia Infrastructure Investment Bank* (AIIB) yang didirikan oleh pemerintah Cina dan dan kini sedang dalam tahap konsolidasi. Lembaga seperti ini tentu tidak hanya memberikan pinjaman dan jaminan pembiayaan tetapi juga mendorong perubahan kebijakan untuk pengembangan infrastruktur.

Sesuai penelusuran kami, sejak 2007-2012 Bank Dunia telah memberikan empat paket untuk pengembangan infrastruktur yaitu *Infrastructure Development Policy Loans (*IDPL) I, II, III dan IV dengan total US$ 850 juta1. Pada Juni 2009 Bank Dunia juga memberikan pinjaman bernama *Indonesia Infrastructure Finance Facility* untuk mendorong pengembangan dua fasilitas pendanaan jangka panjang dalam proyek-proyek infrastruktur, yaitu Dana Penjaminan Infrastruktur Indonesia (*Indonesia Infrastructure Guarantee Fund*/IIGF) dan Fasilitas Pendanaan Infrastruktur Indonesia (*Indonesia Infrastructure Financing Facility*/IIFF). Dengan dukungan IDPL, pada Desember 2009 pemerintah Indonesia akhirnya mendirikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) atau *Indonesia Infrastructure Guarantee Fund* (IIGF).

Perusahaan ini memiliki mandat untuk memberikan jaminan terhadap proyek-proyek infrastruktur dibawah skema *Public-Private Partnership* (PPP).

1 Lihat dokumen Report World Bank No: ICR2196.

Hanya dalam jangka waktu satu bulan kemudian atau pada 15 Januari 2010, pemerintah Indonesia telah mendirikan *PT Indonesia Infrastructure Finance* (PT IIF), sebuah perusahaan pembiayaan infrastruktur yang akan membiayai proyek-proyek infrastruktur melalui instrumen hutang, penyertaan modal, ataupun penjaminan pembiayaan infrastruktur (*credit enhancement*). PT IIF didirikan oleh pemerintah Indonesia melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)2 yang bekerjasama dengan ADB, IFC, dan Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), sebuah perusahaan pemerintah Jerman. Meski secara langsung World Bank tidak memiliki saham dalam perusahaan ini, kehadiran PT IIF diklem oleh pemerintah Indonesia sebagai perusahaan yang didirikan atas inisiatif pemerintah Indonesia, *World Bank,* dan ADB dibantu oleh AUSAID dalam bentuk dukungan bantuan pendanaan dalam proses penyusunan rencana kerja dan studi kelayakan PT IIF3.

Dengan adanya PT IIFdan PT PII/IIGF -- sebagai perwujukan kebijakan “satu pengelola” (*single window*) dalam memberikan penilaian proyek infrastruktur dengan skema PPP yang disokong bank multilateral (MDBs) dan pemerintah Jerman -- maka pada 2010 Presiden SBY kemudian meningkatkan jumlah pembangkit listrik tenaga batubara (PLTU) yang direncanakan untuk luar Jawa-Bali menjadi 32 unit. Pada tahun yang sama pemerintah juga mengumumkan fase kedua program kelistrikan yaitu, *Fast Track Program* II (FTP II)*4* yang membangun 42 PLTU Batubara (3.312 MW), 43 PLTP/ geothermal (4.007 MW), 3 PLTA (1.204 MW), dan 4 PLTG/PLTGU (1.660 MW)*.* Selain itu FTP II juga mencakup pemberian insentif dan proyek-proyek prioritas yang ditujukan pada energi panas bumi, termasuk proyek jaringan kereta api batubara dan pelabuhan yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor batubara, sebagaimana yang ada dalam master plan pemerintah Indonesia untuk infrastruktur.

Peran lembaga pembiayaan juga bisa ditelusuri dari dokumen Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) yang juga diadopsi dalam *Country Strategic Partnership* (CPS) World Bank-Pemerintah Indonesia 2009-2012 dan CPS 2013-2015. Bahkan meskipun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJM) dan Program Nawacita pemerintahan Presiden Jokowi tidak menyebut akan meneruskan MP3EI, namun rencana pembangunan infrastruktur skala besar tetap menjadi bagian utama.

2 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur yang didirikan pada 26 Februari 2009 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 100% kepemilikan saham oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bulan lalu pemerintah telah mengubah mandat PT SMI menjadi bank pembiayaan infrastruktur Indonesia. Juga sedang menyiapkan bank infrastruktur syariah.

3 Lihat Siaran Pers Departemen Keuangan No. 18/HMS/2010 26 Januari 2010 di www.depkeu.qo.id

Dan juga berita di http://www.antaranews.com/berita/171410/pendirian-pt-indonesia-infrastructure-finance.

4 Lihat Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 yang menugaskan PT PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas.

5 http://katadata.co.id/berita/2015/05/20/bank-dunia-tawarkan-utang-rp-145-triliun#sthash.iGVohQ6S.dpuf

6 Reuters, ADB offers $1.5 bln loan for delayed Indonesia infrastructure projects, 1/13/15, http://www.reuters.com/article/2015/01/13/indonesia-adb-idUSL3N0US28420150113

Selang 2015-2019 pemerintahan Jokowi akan membangun 30 waduk baru dan 33 PLTA; jalan baru sepanjang 2,600 km; jalan tol sepanjang 1.000 km; 15 bandara baru; 24 pelabuhan baru; jalur kereta api baru sepanjang 3.200 km, dan perluasan areal perkebunan sawit untuk mendukung kebijakan presiden menggunakan 15% biofuel pada setiap liter solar. Selain itu pemerintahan berencana mempercepat pembangunan 36 PLTU bertenaga batubara yang berkekuatan 20.000 MW sebagai bagian dari paket pembangunan infrastruktur listrik sebesar 35.000 MW dalam lima tahun ke depan. Untuk mendukung seluruh proyek ini, Presiden Jokowi sudah menanda-tangani MoU dengan pemerintah China untuk komitmen pinjaman dana pembiayaan infrastruktur selama 5 tahun ke depan senilai Rp 506 triliun. Dana sebesar itu akan diperoleh melalui *Industrial and Commercial Bank of China* (ICBC) dan *China Development Bank* (CDB). Lalu pada Mei 2015, Bank Dunia telah menawarkan kepada Indonesia untuk mendapatkan utang senilai Rp 145 triliun dalam tiga sampai empat tahun ke depan5, sedangkan ADB menyiapkan paling sedikit US$ 1.5 miliar untuk proyek infrastuktur di Indonesia.6 Selain itu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga mengumumkan mulai tahun depan Indonesia akan memperoleh dana infrastruktur dari AIIB7. Pembangunan Infstaruktur di Indonesia tidak bisa hanya dipandang sebagai proyek yang akan mempengaruhi lingkungan dan sosial di lokasi tapak proyek, tetapi juga merupakan faktor utama yang akan menjadi katalisator peningkatan eksploitasi SDA dan dampaknya. Menjadi faktor yang akan meningkatkan produksi sektor yang terfasilitasi dalam transportasi seperti batu bara, nikel , sawit dan kayu, serta menjadi faktor pemantik peningkatan volume produksi bagi SDA matrial dalam pembangunan infastuktur itu sendiri , seperti penambangan kapur dan pasir besi yang mulai marak menghancurkan pegunungan karst di Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi, termasuk tambang pasir besi di sepanjang pesisir *Ring of Fire.* Di beberapa kawasan juga sedang dan akan berlangsung proses reklamasi pantai/pulau/teluk untuk kepentingan infstruktur pariwisata skala besar. Selain itu, pengalaman selama ini menunjukkan kehadiran proyek-proyek pengelolaan sumberdaya alam maupun pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah yang terkait dengan sumberdaya alam sarat dengan aroma korupsi, *tax evasion* dan *money laundering*. Jika dikaitkan dengan proses pemilihan kepala daerah yang masih digerakkan oleh politik uang, menjadi penting untuk bersikap kuatir bahwa aliran uang besar untuk proyek infrastruktur akan menyuburkan fenomena korupsi dan “politik uang” di berbagai wilayah pembangunan infrastruktur.

7 http://katadata.co.id/berita/2015/04/10/bank-infrastruktur-asia-siap-danai-indonesia-tahun-depan#sthash .N90phILS.dpuf